

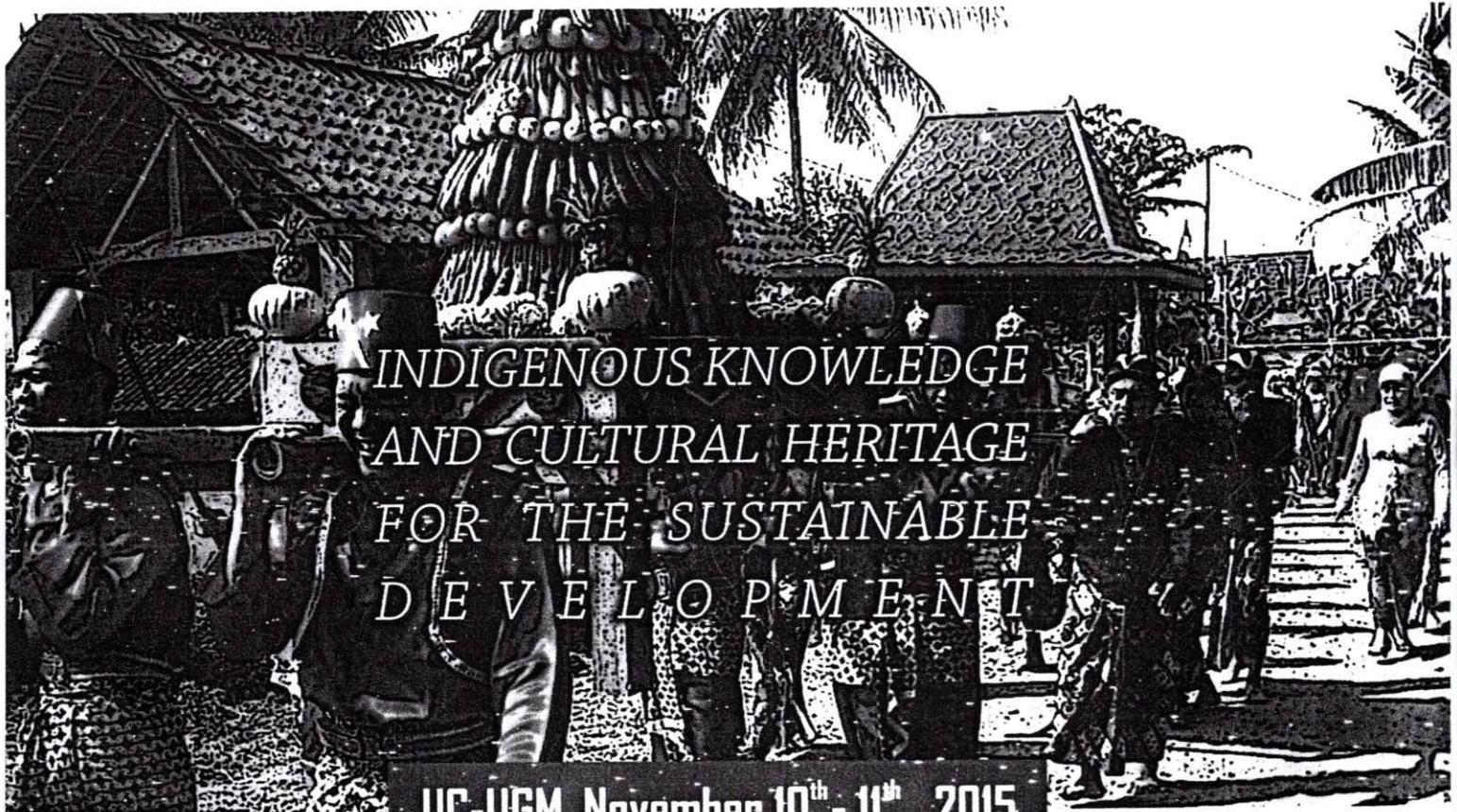
ISSN : 2354-8517

PROCEEDING

INTERNATIONAL CONFERENCE ON

*Nusantara
Philosophy*

(I C N P) 2015



INDIGENOUS KNOWLEDGE
AND CULTURAL HERITAGE
FOR THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

UC-UGM, November 10th - 11th, 2015



Philosophy of Nusantara Laboratory
Faculty of Philosophy, Gadjah Mada University
Yogyakarta, Indonesia

Proceeding

International Conference
on Nusantara Philosophy
(ICNP) 2015

Indigenous Knowledge and Cultural Heritage
For The Sustainable Development

ISSN : 2354-8517

Editor : Arqom Kuswanjono
Tata Letak : Amin Ma'ruf
Cover Design : Lima Design

Hak Cipta © 2015, Fakultas Filsafat UGM

Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Gedung Unit C, Fakultas Filsafat UGM
Jl. Olahraga, Bulaksumur, Yogyakarta
Telp.: 0274-6491191, Faks.: 0274-515368
Email: filsafat@ugm.ac.id
Website: www.filsafat.ugm.ac.id

SUSUMAN PANITIA

- Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Filsafat UGM
Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin
- Pengarah : Dr. Rizal Mustansyir
Dr. Misnal Munir
Drs. Mustofa Anshori Lidinillah, M.Hum
Dr. Sindung Tjahyadi
- Ketua Pelaksana : Dr. Arqom Kuswanjono
- Wakil Ketua : Dr. Rr. Siti Murtiningsih
- Sekretaris : Abdul Rokhmat Sairah, M.Phil.
: Dwi Hernawan, S.IP.
- Acara dan Persidangan : Reno Wikandaru, M.Phil.
Sri Mulasih, S.Sos.
- Publikasi dan Dokumentasi : Slamet Widodo, S.IP.
Hananto Kusumajati
- Perlengkapan : Sunuwidada, S. Sos.
Gunawan Joko Santoso
- Transportasi : Jaka Permadi
Ferry Yusuf

DAFTAR ISI

Susunan Panitia ~ iii

PANEL DISCUSSION

- FILOSOFI SENI PEDALANGAN DAN PEWAYANGAN
SEBAGAI WARISAN BUDAYA NUSANTARA ~ 1
Kasidi Hadiprayitno

- NILAI-NILAI FILOSOFIS
DALAM TATANAN HIDUP
DI RUMAH GADANG MINANGKABAU ~ 15
Misnal Munir
Rizal Mustansyir
Supartiningsih

- WAYANG: A MEDIA USED BY JAVANESE
TO STUDY GENETICS SINCE THE OLD TIMES ~ 31
Budi Setiadi Daryono

- THE CIPTAGELAR LOCAL WISDOM ~ 37
Bambang D
Armaidy Armawi

- TASAWUF NUSANTARA
AND THE PRINCIPLE OF WAHDATULWUJUD ~ 41
Abdelaziz Abacci

IDEOLOGY, PANCASILA PHILOSOPHY AND PANCASILA

- STRATEGI KEBUDAYAAN PANCASILA ~ 47

Agus Sutono

- REFLEKSI DAN REKONSTRUKSI
ILMU KE-PANCASILA-AN DI UGM ~ 55

Heri Santoso

Rizal Mustansyir

Sindung Tjahyadi

Surono

- LIBERALISASI DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
DARI PERSPEKTIF EKONOMI PANCASILA ~ 69

Lailiy Muthmainnah

- PANCASILA DI ANTARA TRADISIONALITAS
DAN PEMBARUAN ~ 85

Sudaryanto

ART, AESTHETICS, CULTURE, MEDIA, AND POP CULTURE

- AESTHETIC ASPECTS OF *PADUNG-PADUNG*
AS PREFERENCE IN DESIGN DEVELOPMENT
OF KARO TRADITIONAL JEWELRY ~ 95

Ariani

- MAKNA SIMBOLIK
DEWA-DEWA DALAM SENI WAYANG:
KAJIAN FILSAFAT MANUSIA ~ 107

Budisutrisna

- **KEBURUKAN WAJAH TOPENG BONDRES
SEBAGAI OTONOMI KEINDAHAN
DALAM IDENTITAS TOKOH RAKYAT ~ 119**

Diah Asmarandani

- **SEMAR MBANGUN KAHYANGAN:
MASIH RELEVANKAH PEMIKIRAN ARENDT
BAGI KEBUDAYAAN? ~ 133**

Kardi Laksana

- **HERBLORE INDONESIA
TANTANGAN KEBERLANJUTANNYA
PADA MASA MENDATANG ~ 147**

Sri Utami

- **RIAS DAN BUSANA PENGANTIN
PAES YOGYA PUTRI
DITINJAU DARI FILSAFAT SENI ~ 161**

Sri Widayanti

- **THE EXISTENCE OF PALEMBANG WAYANG:
ACTUALIZATION OF CULTURAL WISDOM VALUES
FOR THE PRESERVATION OF KNOWLEDGE IN INDONESIA ~ 177**

Yulianingsih Riswan

MULTICULTURALISM AND GLOBALIZATION

- **THE SUSTAINABILITY OF MINANGKABAU ETHNIC
IDENTITY PHILOSOPHY IN VIRTUAL COMMUNITY
PALANTA URANG AWAK MINANGKABAU ~ 189**

Elda Franzia

Yasraj Amir Piliang

- SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL
MASYARAKAT MINANGKABAU:
RELEVANSINYA DENGAN KETAHANAN KELUARGA ~ 201 ✓
Supartiningsih

SOCIAL MOVEMENT AND GENDER

- CONFLICT RESOLUTION
IN THE VALUE OF MULTICULTURAL SOCIETY TRADITION:
A CASE STUDY OF BUGINESE COMMUNITY
IN EAST KALIMANTAN ~ 221 ✓
Abdul Rokhmat Sairah Z.
- MENGGANTUNGAN ASA PADA SANG RATU ADIL
(TELAH FILOSOFIS ATAS KONSEP RATU ADIL
PADA DIRI H.O.S. COKROAMINOTO) ~ 259
Agus Himmawan Utomo
- THE MESSAGE OF CONFLICT RESOLUTION
IN THE ORAL TRADITIONAL ART
OF *SALAWAT DULANG* IN MINANGKABAU ~ 285
Febri Yulika
- KONFLIK SOSIAL
DALAM ADAT PERKAWINAN
MASYARAKAT BELOBATANG-LEMBATA-NTT ~ 297
Hipolitus Kristoforus Kewuel
- TINJAUAN FILSAFAT MANUSIA
ATAS PRINSIP HARMONI MASYARAKAT DESA NGADISARI,
TENGGER, JAWA TIMUR TERHADAP ALAM ~ 311
Septiana Dwiputri Maharani

- THE PHILOSOPHY OF INDONESIAN “*PEMASYARAKATAN*” AND ITS PARADOXES ~ 323

Iqrak Sulhin

INDUSTRY, ENVIRONMENT, AND DISASTER

- DAMPAK KEBAKARAN HUTAN TERHADAP KERUSAKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI INDONESIA ~ 343

Dinarjati Eka Puspitasari

- MENYIMAK ALAM, MENKAJI DIRI: KEARIFAN LOKAL MELAYU RIAU DALAM MENGELOLA LINGKUNGAN PERSPEKTIF ETIKA LINGKUNGAN HIDUP ~ 361

Irwandra

- APPLICATION OF ECO FRIENDLY WOOD PRESERVATION BY PODSOLIC CLAY ~ 389

Taman Alex

Rudi Djatmiko

Budi Winarni

M.Said Umar

Zainal Arifin

- FILOSOFI AIR DALAM PANDANGAN HIDUP MASYARAKAT MELAYU SAMBAS: TINJAUAN SEMIOTIKA ~ 395

Rizal Mustansyir

RELIGION AND RITUAL TRADITION

- RADICAL TRANSFORMATION
IN MOSQUE ORNAMENTATION:
UNIVERSALITY VERSUS HETEROGENEITY
(CASE STUDY IN CITY MOSQUE OF CIREBON) ~ 423
Achmad Haldani D

- C4: RUMUS MANUSIA NUSANTARA
DALAM TASAWUF ISLAM ~ 441
Ammar Fauzi

- THE HIDDEN MEANING OF *PRIHATIN* PRACTICE
OF TARIKAT ULUWIYAH IN PESANTREN BAITURROHMAH
MALANG, EAST JAVA
(AN INVENTORY OF THE INDONESIAN SUFISM TREASURES) ~ 451
Farid

- UPACARA SENI HODO
SEBAGAI RITUAL KESUBURAN
MASYARAKAT DUKUH PARIOPO SITUBONDO ~ 459
Panakajaya Hidayatullah

- KESEHATAN JIWA
MENURUT PARADIGMA ISLAM
(KAJIAN BERDASARKAN AL QURAN DAN HADIST) ~ 473
Qurotul Uyun

- *LAKU RITUAL*
DALAM TRADISI PENCAK SILAT
UNTUK KESELAMATAN ~ 483
Suryo Ediyono

- *LOCAL WISDOM*
DALAM TRADISI NU ~ 497 ✓
Syarif Hidayatullah

- PERNIKAHAN DI PAGUYUBAN WARGA HARDO PUSORO:
ANTARA RITUAL DAN KONSTITUSI ~ 525
Teguh Tri Wahyudi

- PEREMPUAN, KEMISKINAN
DAN KEARIFAN LOKAL MINANGKABAU ~ 541
Widia Fithri

ETHICS AND EDUCATION

- THE MORAL PHILOSOPHY
OF GURINDAM DUA BELAS RAJA ALI HAJI:
19TH CENTURIES MALAY'S CULTURAL HERITAGE
FROM PENYENGAT ISLAND, RIAU ARCHIPELAGO ~ 551 ✓
L.N. Firdaus
Syafsir Akhlus

- AKSIOLOGI
FILSAFAT JAWA
TERKAIT PEMAHAMAN
ILMU PENGETAHUAN KEDOKTERAN ~ 563
Judajana

- PEMAHAMAN RASIONAL
KARAKTER BANGSA INDONESIA
DALAM TIGA TUTURAN ~ 567
Heri Suwignyo

- STUDENT CHARACTER BUILDING AND DEVELOPMENT AT DEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY THROUGH THE VALUES OF *MARTUHAN-MARROHA-MARBISUK* ~ 579

Mariana Simanjuntak
Santi Manalu

- BERPENDIDIKAN ETIKA:
MENELUSURI JEJAK PENDIDIKAN YANG IDEAL ~ 589

Maryaeni

- DIMENSI AKSIOLOGIS
AJARAN *SASTRAJENDRA HAYUNINGRAT PANGRUWATING DIYU*
DALAM LAKON BIMA SEKTI DALANG KI TIMBUL HADIPRAYITNO
CERMOMANGGOLO: RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN
KARAKTER BANGSA ~ 601

Sri Suryati Soetardjo
Koento Wibisono S.
Kaelan
Kasidi H

- ENGAGING CHEMISTRY STUDENTS
IN EDUCATION FOR SUSTAINABILITY
IN ETHICAL DILEMMAS STORIES PEDAGOGY ~ 619

Yuli Rahmawati

- MEMBANDINGKAN AJARAN ETIKA KEUTAMAAN
ANTARA *ASTHA BRATA* DENGAN TAOISME ~ 629

Imam Wahyudi

POLITICS, DIPLOMACY, AND INTERNATIONAL RELATIONSHIP

- *KASEKTEN*:
EPISTEMOLOGİ KEKUASAAN
DALAM PANDANGAN DUNIA ORANG JAWA ~ 643

Aryaning Arya Kresna

- TINJAUAN ETIS
DIMENSI STATIKA DAN DINAMIKA
DALAM KEPEMIMPINAN MASYARAKAT MADURA ~ 655

Ridwan Ahmad Sukri

- REVOLUSI MENTAL DAN MANUSIA INDONESIA
DALAM KAJIAN AKADEMIS-FILOSOFIS
(REFLEKSI KRITIS ATAS PRAKSIS POLITIK
Pemerintahan Jokowi) ~ 663

Mukhtasar Syamsuddin

PEREMPUAN, KEMISKINAN DAN KEARIFAN LOKAL MINANGKABAU

Widia Fithri¹

Abstrak

Wajah perempuan Indonesia hari ini tidak jauh berbeda dengan wajah perempuan Indonesia tahun 1928. Data menunjukkan bahwa 63.7 % perempuan Indonesia berstatus miskin sekaligus sebagai pengemban tugas kepala keluarga alias tulang punggung keluarga. Perempuan miskin sesungguhnya jauh lebih berdampak buruk daripada laki-laki miskin, karena perempuan atau ibu berperan ganda dalam keluarga yang secara emosional lebih dekat dengan anak-anak. Mengurangi jumlah wanita miskin justru akan memunculkan efek berganda dalam meningkatkan kesejahteraan anak, yang menjadi generasi masa depan. Kesejahteraan wanita menjadi penentu utama dalam mewujudkan korelasi positif antarpertumbuhan dan pengentasan kemiskinan.

A. Pendahuluan

Pembangunan kualitas hidup perempuan menjadi penting, mengingat kualitas hidup perempuan sangat menentukan generasi yang akan datang. Hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan kualitas hidup perempuan adalah masalah kesejahteraan perempuan, masalah pendidikan dan kesehatan serta menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Informasi yang dirilis oleh WCC Nurani di Padang pada akhir tahun 2013 tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan masih tergolong tinggi. Salah satu faktor pemicunya adalah tidak adanya payung hukum yang jelas untuk tindakan ini. Lain halnya dengan informasi dari Ketua P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang, Nelvi Irwan Prayitno mengatakan, meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kondisinya semakin memprihatinkan, namun yang terungkap kepermukaan sangat sedikit, ibarat gunung es.

Pada tahun 2012 tercatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di P2TP2A Sumbar sekitar 155 kasus, terdiri dari 95 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 60 kasus terjadi pada anak. Sedangkan kasus yang dilayani P2TP2A Sumbar tahun 2013 sebanyak 23 kasus yang terdiri dari 10 kasus kekerasan pada perempuan dan 13 kasus kekerasan pada anak, pada kondisi terakhir Oktober 2014 tercatat 48 kasus yang terdiri dari 40 kasus perempuan dewasa, 1 laki-laki dewasa dan 7 anak-anak.

¹ Jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang; widia_fithri@yahoo.co.id.

Dalam catatan Direktorat Serse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat hampir semua kasus kekerasan terhadap perempuan dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi. Silvia Hanani : 2008 menjelaskan bahwa Hal ini menjadi indikator tentang tidak terbentuknya lagi sistem ekonomi produktif perempuan, karena telah dicabutnya tanah ulayat sebagai aset ekonomi mandiri perempuan oleh pihak-pihak yang tidak dibolehkan oleh adat. Dengan ketidakmandiriannya itu, perempuan sangat rentan mengalami kasus kekerasan. Inilah sebuah potret realitas faktual yang sangat jelas menunjukkan bahwa kasus KDRT yang dialami oleh perempuan, sangat dipengaruhi oleh ketidakmandirian ekonomi perempuan, sehingga ia rela mengalami kekerasan oleh suami atau pihak lain. Perempuan tidak punya pekerjaan dan tidak memiliki aset usaha, tidak mandiri secara ekonomis. Ketidakmandirian dari segi ekonomi ini ternyata berpengaruh terhadap sikap yang diambil perempuan jika dia mengalami kekerasan. Perempuan lebih memilih bersikap diam terhadap kasus yang menimpanya, sebab dengan sikapnya yang seperti itu kebutuhannya masih bisa dipenuhi oleh suami atau pihak yang bertanggungjawab terhadap kebutuhannya. Ketergantungan yang tinggi inilah yang menyebabkannya sangat rentan dengan kasus KDRT.

Nelvi Irwan Prayitno menjelaskan pemerintah menyadari bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah saja, melainkan harus ada kerja sama sinergis banyak pihak terkait dengan fungsi terpadu dan saling membantu.” Hal ini disampaikan pada saat menghadiri MOU P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang dengan mitra kerja terkait. Pemerintah bertekad memberikan pelayanan terbaik bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan berhak mendapatkan penanganan kesehatan dan penyidikan dari kepolisian. Hal ini tentunya membutuhkan visum *et repertum* untuk mendapatkan bantuan hukum. Berdasarkan pengalaman di lapangan, korban umumnya berasal dari kalangan menengah ke bawah, dimana mereka tidak mampu membiayai urusan perkara tersebut.

Wajah perempuan Indonesia hari ini tidak jauh beda dengan wajah perempuan Indonesia tahun 1928. Kebebasan perempuan yang digadang-gadang memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh kesempatan di berbagai sektor, baik politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya, dalam kenyataan tidak berdampak signifikan dalam mengangkat harkat derajat perempuan. Data menunjukkan bahwa 63.7 % perempuan Indonesia berstatus miskin sekaligus mengemban tugas sebagai kepala keluarga alias tulang punggung keluarga. Demikian diungkapkan oleh Yefri Heriani dari LSM Nurani Perempuan Padang dalam acara workshop yang diadakan Pimpinan Aisyiah Wilayah Sumatera Barat.² Apa pentingnya membicarakan perempuan dalam kaitannya dengan kemiskinan? Bagaimana konsep nilai kearifan lokal Minangkabau menjadi landasan nilai bagi masalah perempuan dan kemiskinan ?

² Workshop yang diorganisir oleh Pimpinan Wilayah Aisyiah Sumatera Barat, 17 April 2015.

B. Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Objek material penelitian ini adalah Perempuan, Kemiskinan dan Kearifan lokal Minangkabau. Objek Formal penelitian ini adalah Filsafat Nusantara dalam hal ini Filsafat Minangkabau. Analisa data digunakan dengan analisis deskriptif. Studi kasus ini mengambil tempat di kota Padang dengan alasan kota Padang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Barat. Saat ini tercatat jumlah penduduk miskin, hampir miskin dan rawan miskin di Sumbar berjumlah 410. 102. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar Rahmad Sani. "Kota Padang paling banyak jumlah penduduk miskinnya, disusul Pesisir selatan dan Agam. Data itu merupakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 (<http://www.jpnn>) Tujuan penelitian ini adalah 1) membangun serta mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan untuk ikut serta dan berperan aktif dalam memelihara dan melestarikan ketahanan keluarga, karena keluarga menjadi episentrum dalam perbaikan masyarakat. 2) Menggali dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal Minangkabau dalam merespon perubahan yang terjadi pada masyarakat terutama penguatan peran serta perempuan dalam membangun bangsa.

C. Kemiskinan dan Perempuan

Kemiskinan yang asal katanya *miskin* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah), juga disebutkan bahwa kemiskinan sebagai "hal miskin" atau "keadaan miskin". Sedangkan miskin absolut adalah situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.

Bappenas memberikan pengertian bahwa kemiskinan diartikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain : tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Dari defenisi kemiskinan yang ditampilkan secara umum, kemiskinan mengacu pada aspek ekonomis mengarah pada ketiadaan, meskipun dalam realitasnya kemiskinan itu tidak berwajah tunggal namun sangat kompleks dan multidimensi.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2004-2009 tidak hanya dipahami sebagai ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, dan rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan.

Kemiskinan diklasifikasikan sebagai kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan, sedangkan kemiskinan absolut adalah situasi rumahtangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Rumah tangga yang mengalami kemiskinan absolut berada dalam situasi kelaparan kronis, tidak mampu mengakses sarana kesehatan, tidak memiliki sumber air bersih dan sanitasi yang baik, tidak mampu menyekolahkan sebagian atau semua anak dalam rumahtangga, dan mungkin tidak memiliki tempat perlindungan dasar. (BPS, 2008 : 5).

Pengukuran Kemiskinan. BPS menetapkan 8 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan kriteria rumah tangga miskin. Kedelapan variabel tersebut adalah :

- 1). Luas lantai per kapita <8 m²
- 2). Jenis lantai adalah tanah
- 3). Air bersih berasal dari sumber yang tidak terlindung.
- 4). Tidak ada jamban/WC
- 5). Tidak memiliki aset
- 6). Pendapatan total kurang dari 350.000 per bulan
- 7). Persentase pengeluaran untuk makanan > 80% pendapatan
- 8). Konsumsi lauk pauk tidak ada/ walaupun ada tidak bervariasi

BPS mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2008)

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2010 sebesar 5,93%. Angka ini lebih rendah dibandingkan nasional, dimana pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,10%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi kemungkinan menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Kemudian, rasio gender Sumatera Barat juga cukup tinggi yaitu sebesar 50,39% pada tahun 2010. Artinya jumlah penduduk perempuan melebihi jumlah penduduk laki-laki. Fenomena ini kemungkinan menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Sumatera Barat, sebagaimana teori ekonomi mengatakan bahwa semakin tinggi jumlah

penduduk perempuan menyebabkan tingginya angka kemiskinan (Reni Mustika : 2012).

Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok-kelompok marjinal dan kaum perempuan yang pada umumnya merupakan pihak yang banyak dirugikan. Dalam rumah tangga miskin, mereka sering menjadi pihak yang menanggung beban kerja yang lebih berat dari pada kaum pria. Demikian pula dengan anak-anak, mereka juga menderita akibat adanya ketidakmerataan beban kerja. Kualitas hidup masa depan mereka terancam oleh karena tidak tercukupinya gizi, pemerataan kesehatan dan pendidikan (Bahri, 2005).

Beberapa studi ekonomi makro menegaskan bahwa wanita yang lebih berpendidikan akan memberikan sumbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan generasi muda melalui penurunan angka kematian bayi dan anak-anak, tingkat kesuburan yang lebih rendah, dan peningkatan gizi anak-anak. Pada tingkat ekonomi makro, salah satu hasil studi menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu persen kepesertaan wanita dalam pendidikan sekolah menengah menghasilkan 0,3 persen peningkatan dalam pendapatan per kapita (Dollar dan Gatti, 1999: dalam Michael Bamberger dkk., hal. 341).

Ketidaksetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat, penafsiran agama dan konstruksi sosial budaya yang mengatur alokasi peran, atribut, stereotip, hak, kewajiban, tanggung jawab dan persepsi terhadap laki-laki maupun perempuan. Marjinalisasi, diskriminasi dan subordinasi terhadap kaum perempuan membuat daya saing perempuan dalam berbagai aspek kehidupan menjadisangat lemah. Hal ini menyebabkan kondisi perempuan makin memprihatinkan (Susanti, 2006).

Kombinasi ketiadaan akses pada unsur ekonomi, sosial, dan kuasa yang dihadapi oleh perempuan miskin menyebabkan terjadinya peningkatan "*feminization of poverty*". Pemiskinan perempuan secara langsung terkait pada status ekonomi rendah, termasuk tidak adanya peluang ekonomi dan otonomi, kurangnya akses terhadap sumberdaya ekonomi (termasuk kredit, pemilikan lahan dan pewarisan), kurangnya akses ke pendidikan dan jasa pendukung dan minimnya partisipasi mereka dalam penentuan keputusan. Kemiskinan juga dapat mendorong perempuan kedalam situasi rawan pada eksploitasi seksual (Susanti, 2006).

Sumatera Barat khususnya Kota Padang yang memiliki budaya *Minangkabau* yang dikenal memiliki sistem matrilineal ternyata tidak menjamin tingginya peran dan partisipasi perempuan khususnya dalam ranah publik. Akses dan kontrol perempuan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sumberdaya yang ada disekitarnya masih lebih banyak ditentukan oleh orang-orang yang berada diluar dirinya. Peluang perempuan untuk mendapatkan modal secara mandiri masih terhalang oleh syarat izin. Disamping itu, beban kemiskinan mempersempit peluang untuk dapat memajukan dan meningkatkan kapasitas diri (LP2M, 2006)

Perempuan miskin sesungguhnya jauh lebih berdampak buruk dari pada laki-laki miskin, karena perempuan atau ibu berperan ganda dalam keluarga yang secara emosional lebih dekat dengan anak-anak. Peran ganda perempuan sebagai penentu urusan dapur keluarga yang bergayut didirinya segala urusan keluarga termasuk anak-anak. Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa kemiskinan di kalangan wanita mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak lebih dari pada pria. Ketika penghasilan wanita meningkat dan jumlah wanita miskin berkurang, anak-anak juga memperoleh manfaat dari perkembangan itu karena dibandingkan dengan pria, wanita lebih banyak membelanjakan uang mereka untuk keluarga dan khususnya untuk anak-anak. Dengan kata lain, mengurangi jumlah wanita miskin justru akan memunculkan efek berganda dalam meningkatkan kesejahteraan anak, yang menjadi generasi masa depan. Kesejahteraan wanita menjadi penentu utama dalam mewujudkan korelasi positif antarpertumbuhan dan pengentasan kemiskinan.

D. Perempuan Dalam Kearifan Lokal Minangkabau

Perempuan dalam budaya Minangkabau di sebut dengan Bundo kanduang. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang matrilineal Bundo kanduang punya kedudukan central dan memiliki fungsi strategis. Bundo Kandang dalam pepatah Adat dinukilkan sebagai berikut:

*Bundo kanduang
Limpapeh rumah nan gadang
Sumarak dalam nagari
Hiasar di dalam kampung
Nan tahu di malu sopan
Kamahias kampung jo halaman
Sarato koto jo nagari
Sampai ka balai jo musajik
Sarato jo rumah tanggo*

*Dihias jo budi baiak
Malu sopan tinggi sakali
Baso jo basi bapakaian
Nan gadang basa batuah
Kok hiduik tampek banazar
Kok mati tampek baniat*

*Tiang kokoh budi nan baiak
Pasak kunci malu jo sopan
Hiasan dunia jo akhirat
Auih tampek mintak aia
Lapa tempek mintak nasi*

Bundo kanduang
Limpapeh rumah nan gadang
Menyemarakkan Nagari
Hiasan dalam kampung
Yang punya sopan santun
Yang menghiasi kampung dan hal
laman serta nagari
sampai ke pasar dan mesjid
serta rumah tangga

yang memiliki budi baik
yang memiliki sopan santun
Melekat didirinya budi bahasa
yang Agung dan Terhormat
Selagi hidup tempat bernazar
Setelah mati tempat berniat

Tiang utama budi yang baik
Menjaga rasa malu dan kesopanan
Hiasan dunia dan akhirat
Tempat meminta air ketika haus
Tempat meminta nasi jika lapar

Bundo kanduang merupakan lambang kehormatan dalam kaumnya terutama dalam nagari. Lambang kehormatan tersebut bukan hanya didasarkan pada kodratnya atau bentuk fisiknya, tetapi lebih ke bentuk kepribadiannya yang disebut dengan budi. Ibu menjadi hiasan dalam kampung, yang berasal dari kepribadiannya dalam arti ibu mengerti tatacara, sopan santu, budi pekerti, dan memelihara diri dan kaumnya. Selain beberapa hal tersebut, ibu juga mengerti dengan agama, memahami aturan agama, memelihara masyarakatnya dari hal-hal yang mendatangkan dosa.

Dalam masyarakat Minangkabau kehadiran seorang perempuan didalam keluarga sangat diharapkan. Jika tidak ada keturunan perempuan dalam suatu keluarga, dapat dikatakan garis keturunan keluarga tersebut terputus, alasannya karena dalam kekerabatan matrilineal, garis keturunan mengikuti garis keturunan ibu (perempuan).

Menurut garis kekerabatan matrilineal, pemilik harta di Minangkabau adalah kaum wanita. Laki-laki tidak berhak untuk memiliki harta pusaka, namun ia diberi kewajiban untuk mengembangkan harta tersebut. Harta pusaka adalah warisan yang menurut adat Minangkabau diterima dari mamak kepada kemenakan. Setiap harta pusaka selalu dijaga dan pelihara agar tetap utuh. Menjaga keutuhan harta pusaka ini berarti menjaga keutuhan kaum kerabat. Hingga harta ini dapat diturunkan kepada generasi berikutnya, sebagai penerus keturunan. Harta diturunkan dari mamak kepada kemenakan, kemenakan disini adalah kemenakan yang perempuan sebagai penerus garis keturunan. Kemenakan yang laki-laki tidak berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Walau demikian kemenakan yang laki-laki diberi kewajiban untuk menjaga dan mengembangkan harta pusaka tersebut. Dalam penggunaannya di atur oleh kaum perempuan.

Pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi perempuan dalam tatanan adat Minangkabau, seperti pendidikan Agama, budi pekerti dan basa basi, sampai menuntun menjadi seorang perempuan yang arif bijak bestari, merupakan hal utama yang harus dimiliki perempuan Minangkaabau. Menanamkan pengetahuan tentang harta pusaka serta batas-batas kepemilikannya serta penggunaan dari hasil yang terkandung di dalam maupun di atasnya, menjadi pegangan utama bagi kaum perempuan, demi menjaga kemaslahatan suku/kaumnya.

Pada prinsipnya perempuan Minangkabau memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan seluas-luasnya serta kesempatan untuk mengatur perekonomian kaum, semua berada dalam genggamannya. Maka, kaum perempuan juga disebut sebagai pemegang kunci peti perbendaharaan harta dan lumbung padi yang berada di setiap halaman Rumah Gadang. Sebagai seorang ratu, perempuan Minangkabau biasa diandaikan dengan sebutan Limpapeh Rumah Gadang. Menjadi penyumarak anjuang (ruang di atas Rumah Gadang).

Perempuan Minangkabau tidak boleh bicara sembarangan, apalagi bergunjing. Perempuan Minangkabau dilarang keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang

sangat penting, tidak akan terjadi. Dalam tatanan Adat Minangkabau, jika terjadi permasalahan yang menimbulkan perselisihan, maka para pemuk adat dapat meminta pertimbangan bijaksana kepada kaum perempuan atau Bundo kanduang. Meskipun pada dasarnya pengendali dan pengelola Adat Minangkabau adalah laki-laki, namun ruang yang begitu besar serta kesempatan yang diberikan untuk memperoleh pengetahuan lebih besar memunculkan sikap yang arif bijaksana. Maka petuah yang telah dikeluarkan Bunda Kanduang, menjadi acuan untuk sebuah keputusan dalam tatanan pemerintahan adat di Minangkabau.

E. Kesimpulan

- (1) Mengurangi jumlah wanita miskin justru akan memunculkan efek berganda dalam meningkatkan kesejahteraan anak, yang menjadi generasi masa depan. Kesejahteraan wanita menjadi penentu utama dalam mewujudkan korelasi positif antara pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan.
- (2) Orang Minangkabau harus menyadari nilai-nilai kearifan lokal tentang kedudukan dan fungsi Bundo kanduang yang amat luas dalam tatanan masyarakat saat ini sudah mulai bergeser dan terkikis, maka sudah saatnya untuk semua pihak menyadari perlunya penguatan lembaga Bundo kanduang dan lembaga sosial yang bergerak dalam masalah perempuan untuk memberi andil bagi hadirnya kesejahteraan bagi perempuan kini dan nanti.

Daftar Pustaka

- Amir, M.S, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya. 2003.
- Fitri, Reni Mustika 2012, *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Rasio Gender Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat*, Tesis, UNP
- Hamka, *Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya*. Padang : Semitar Hukum Adat Minangkabau. 1968.
- Naim, Muchtar (ed), 1968, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang : Center For Minangkabau Studies. 1968.
- Hanani, Silvia, 2008, Tanah Ulayat Dan Kemiskinan Perempuan Di Ranah Matrilineal, dalam Kafa'ah, Jurnal ilmiah Gender
- Hariani, Yefri, 2015, Perempuan dan Pendampingan Bantuan Hukum, dalam Workshop Kolaboratif Majelis Hukum dan HAM dan Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Aisyiah Wilayah Sumatera Barat
- Melyenti, Sri 2005, Akses Perempuan Miskin Terhadap Pelayanan Kesehatan Reproduksi, *Jurnal Antropologi*, UNAND Padang
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2006. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010:

Agenda 6 Mempercepat Penurunan Tingkat Kemiskinan. Padang;
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Jayaputra Achmadi, 2012, *Pemetaan Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya Berbasis
institusi Lokal dan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah*, Puslitbang
Kesos